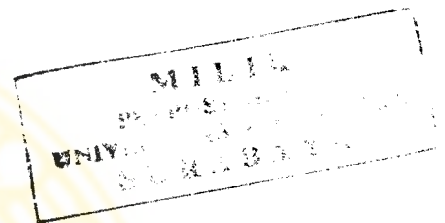
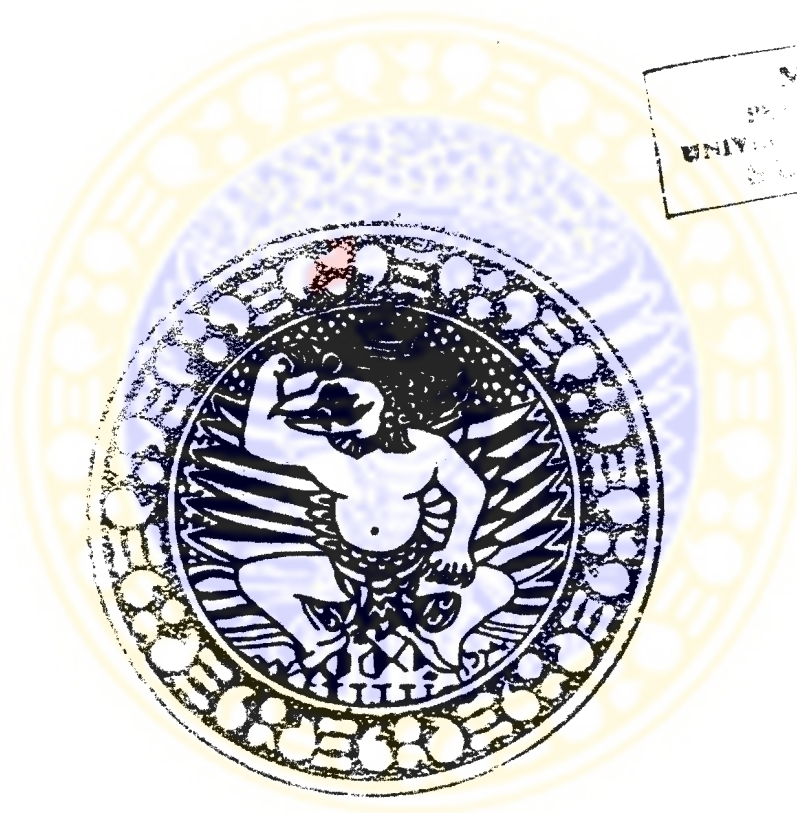


SKRIPSI

PURWAWATI NOVEANI TUNGGA

PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DENGAN MENGGUNAKAN MEREK



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2000

**PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
DENGAN MENGGUNAKAN MEREK**



SKRIPSI


**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,

Penyusun,



H.A. Oemar Wongsodiwirjo, S.H.
NIP. 130325843



Purwawati Noveani Tunggal
NIM. 039614295

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2000**

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari uraian dan pembahasan tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat Dengan Menggunakan Merek, adalah:

- a. Praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia selama ini lahir sebagai akibat dari kebijakan dan tindakan Pemerintah di bidang industri dan perdagangan yang tidak sehat. Monopoli dan praktek persaingan usaha tidak sehat yang ada merupakan hasil dari suatu kebijakan Pemerintah yang lebih ditujukan kepada salah satu perusahaan swasta dan atau organisasi sejenis baik dalam bentuk pengaturan persaingan di kalangan mereka sendiri maupun dalam bentuk merger, konsolidasi dan akuisisi. Hal ini disebabkan Indonesia belum memiliki perangkat perundang-undangan antimonopoli yang komprehensif seperti di negara-negara lain, meskipun praktek persaingan usaha tidak sehat dalam bisnis sebenarnya sudah diatur dalam berbagai produk perundang-undangan nasional. Perlindungan terhadap persaingan usaha tidak sehat akan lebih efektif kalau ada undang-undang yang secara khusus mengatur dan melindungi persaingan dari praktek bisnis curang, namun undang-undang tersebut dimaksudkan untuk melindungi persaingan sehat dan bukan melindungi pelaku usaha tertentu.
- b. Persaingan usaha tidak sehat dengan menggunakan merek hanya dapat dilakukan terhadap merek-merek yang telah terdaftar dalam Daftar Umum

Merek, hal ini dikarenakan Indonesia menganut sistem pendaftaran terhadap perlindungan merek terhadap persaingan usaha tidak sehat. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya pemalsuan maupun penggunaan merek terdaftar dengan tanpa hak dapat merugikan produsen karena secara langsung omzet produksi mereka dikurangi, penjualan mereka menjadi kecil dan karenanya juga mengakibatkan penghasilan mereka menjadi kecil. Selain itu juga mengakibatkan kerugian pada konsumen dimana dalam hal ini konsumen umumnya memperoleh barang dengan kualitas yang lebih rendah daripada barang asli. Seringkali tidak ada perlindungan hukum bagi pihak konsumen terhadap pemalsuan suatu produk. Tanggung jawab terhadap hasil produksi pihak produsen ternyata tidak dapat direalisasikan dengan barang-barang yang merupakan tiruan. Hal ini dikarenakan asal usul peniru sukar ditelusuri. Serta pemalsuan terhadap merek yang sudah terdaftar juga mempengaruhi perdagangan dengan pihak luar negeri. Persaingan usaha tidak sehat dengan menggunakan merek terjadi karena, pemahaman masyarakat yang kurang terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual, khususnya di bidang merek sangat mempengaruhi tingkat kesadaran dan penghargaan masyarakat terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual.

2. Saran

Saran-saran yang mungkin berguna bagi kita semua diantaranya, adalah:

- a. Dengan adanya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tersebut, maka

Pemerintah perlu mencabut semua produk hukum yang bertentangan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, termasuk produk hukum dalam proses tender proyek-proyek Pemerintah (BUMN) yang menyebabkan terciptanya monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam bisnis. Agar Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dapat berjalan sebagaimana diinginkan perlu dibentuk suatu lembaga, yaitu Komisi Perdagangan Sehat Indonesia, yang merupakan badan atau lembaga yang bersifat mandiri dan independen yang didirikan berdasarkan undang-undang.

- b. Sanksi terhadap pelanggaran merek terdaftar harus benar-benar dilaksanakan, bukan hanya merupakan aturan yang keras terhadap pelanggaran merek. Diperlukan pemasyarakatan terhadap penggunaan merek dagang tentang arti, fungsi dan peranannya dalam perindustrian dan perdagangan. Pemasyarakatan penggunaan merek dagang harus dilaksanakan secara efektif, terencana dan terpadu serta terkoordinasi dengan semua pihak yang terkait. Dengan begitu diharapkan akan meningkatkan rasa percaya diri yang kuat dalam menghadapi persaingan, baik dalam negeri maupun luar negeri terutama untuk menggunakan merek dagang milik mereka sendiri. Selain itu, untuk lebih meningkatkan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual, khususnya di bidang merek perlu adanya peradilan khusus atau bagian khusus yang ditangani oleh hakim-hakim yang telah dilatih dalam bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual, khususnya di bidang merek. Sebagai upaya preventif, selain ganti

rugi yang dapat diberikan kepada si pemilik hak, negara menjatuhkan pidana penjara dan denda. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya di bidang merek disarankan agar pelatihan mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual, khususnya di bidang merek terus ditingkatkan. Mengingat penyelesaian perkara Hak Atas Kekayaan Intelektual, khususnya di bidang merek harus dilakukan dengan cepat untuk tidak menimbulkan kerugian yang lebih parah lagi kepada pemilik hak, yang seringkali berdampak internasional, pemeriksaan Hak Atas Kekayaan Intelektual, khususnya di bidang merek perlu ditangani secara “prioritas” oleh hakim-hakim yang berpengalaman, baik di Pengadilan Negeri maupun di Mahkamah Agung. Agar putusan kasasi mengenai perkara Hak Atas Kekayaan Intelektual, khususnya di bidang merek seragam dan konsisten kiranya ditunjuk majelis-majelis hakim tertentu saja di Mahkamah Agung yang menangani perkara kasasi Hak Atas Kekayaan Intelektual, khususnya di bidang merek.